

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut setiap orang untuk berupaya berdayaguna dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya kearah yang lebih baik. Baik itu melalui sektor formal maupun saktor informal, sektor informal merupakan sektor perekonomian yang tidak atau sedikit mendapatkan proteksi kebijakan ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan sektor formal adalah sektor usaha yang mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah. Meskipun demikian, sektor informal berkembang pesat dan semakin luas di berbagai kota di Indonesia (Nora Kamelia 2021).

Pada dasarnya kota merupakan tempat pemukiman yang relatif besar, berpenduduk padat dan permanen dari individu-individu yang secara sosial heterogen. Dalam perkembangannya kota dianggap sebagai tempat yang menjanjikan dalam mencari mata pencaharian. Banyak orang yang pindah dari desa ke kota, keadaan ini menyebabkan perubahan kebiasaan mereka. Mayoritas warga perkotaan menjadi bersifat individualistis dan interaksinya bersifat impersonal, dan menciptakan orientasi masyarakat hanya sebatas pada (Sarlito W. Sarwono 2011:221).

Bukanlah suatu hal yang mudah untuk bertahan hidup di tengah situasi yang krisis saat ini, ditambah dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga beberapa kebutuhan pokok sebagai dampak dari naiknya harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang mengakibatkan inflasi. Inflasi dimana laju pergerakan

harga barang dan jasa kebutuhan hidup melonjak. Inflasi yang berimbas pada setiap sudut kehidupan, banyak bidang usaha yang melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja agar tetap dapat beroperasi. Bahkan beberapa harus menutup usahanya karena tidak lagi mempunyai daya saing. Jika sudah demikian yang terjadi adalah bertambahnya jumlah pengangguran, angkatan kerja yang tidak memiliki kekayaan dan makin bertambahnya masyarakat miskin (Daipaha 2015).

Pola konglomerasi, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial bermuara kepada tingginya angka pengangguran. Baik di daerah pedesaan dan perkotaan selalu diwarnai kepada tingginya angka kesenjangan antara pasaran kerja dan pertumbuhan pencari kerja. Sektor formal masyarakat perkotaan ternyata tidak mampu menyerap seluruh pertumbuhan angkatan kerja, sehingga kegiatan ekonomi sektor informal menjadi pelimpahan beban sebagai upaya dalam mengurangi pengangguran. Akibatnya, baik masyarakat kota maupun desa banyak yang memilih sektor informal sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka (Nasution 2020).

Tidak semua orang mendapatkan kesempatan pekerjaan di sektor formal sehingga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan dan keluarganya. Faktor penyebabnya antara lain bekal pendidikan formal yang rendah, keterampilan yang tidak memadai, ketimpangan pembangunan secara geografis yang meningkatkan urbanisasi, dan lain sebagainya. Seiring dengan hal tersebut, pemenuhan kehidupan hidup primer tidak dapat ditunda dan terus mendesak. Hal itulah kemudian yang mendorong pertumbuhan kegiatan

ekonomi informal dalam berbagai bentuk, sebagai alternatif upaya pemenuhan kebutuhan primer yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu bentuknya yang populer di Indonesia adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), yang dalam perkembangannya seperti buah simalakama, dibutuhkan sekaligus menimbulkan permasalahan.

Keberadaan PKL di mata masyarakat, ada pihak yang pro/mendukung di samping yang kontra/menentang. Pihak yang mendukung memandang dari sudut arti yang positif bahwa PKL dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah, PKL sebagai awal seseorang bekerja, menampakkan sifatnya yang tahan pada masa krisis sekaligus sebagai peluang kerja/memberikan lapangan pekerjaan dari sekian banyak penganggur. Para penganggur ini mencoba berkreasi, berwirausaha dengan modal sendiri bahkan tanpa modal (uang). Mereka adalah orang-orang yang optimis menatap kehidupan, berjuang memenuhi tuntutan hidup. Oleh karenanya tidaklah berlebihan apabila Menaker beserta ketua Kadin Pusat telah merencanakan agar PKL dibina bukan dibinasakan, jangan dikejar-kejar, jangan dimatikan karena mereka turut andil membangun lapangan kerja. Melalui PKL konsumen mendapat kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya sambil berjalan-jalan. Kebanyakan barang-barang yang dijual PKL adalah barang-barang *conveniences* (berkategori menyenangkan seperti souvenir atau kebutuhan sehari-hari di luar sembako) yang dibeli dengan cara emosional artinya begitu melihat barang langsung timbul keinginan membeli (Zahrah Ghoniyah Failina 2023).

Pihak yang kontra berpendapat bahwa dengan membiarkan keberadaan PKL sama artinya dengan melanggengkan kemiskinan, memperbesar ruang kriminalitas, PKL sumber gangguan ketertiban dimana kebanyakan PKL tidak menghiraukan tata tertib, kebersihan, dimana ada PKL yang menimbulkan kesemrawutan, kotor, kumuh, banyak sampah. Dengan kata lain menimbulkan permasalahan berkaitan dengan usaha pengembangan tata ruang kota karena ketidaktertibannya sebagai akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini.

Terlepas dari beberapa keunggulan dan permasalahan yang dialami pedagang Kaki Lima sebagaimana dikemukakan di atas, namun hasil pra-survei menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang Kaki Lima merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal yang membuka usahanya di bidang produksi dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang relatif kecil serta menempati ruang publik. Sebagaimana sektor informal lainnya, pedagang kaki lima juga banyak menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, ternyata memperoleh pendapatan rata-rata pertahun yang tergolong rendah. Indikasi rendahnya tingkat pendapatan mereka dapat ditelusuri melalui kepemilikan rumah tinggal, di mana sebagian besar masih mengontrak rumah, bahkan ada di antara mereka yang masih tinggal di rumah keluarganya (DANIEL W. BROMLEY 2008:175)

Masalah lain menyangkut pendekatan pembinaan yang kurang didukung penataan aturan-aturan untuk melindungi sektor informal. Hal ini menimbulkan kesulitan terhadap pemerintah dalam membina sektor informal,

sebab tidak sedikit di kalangan sektor informal yang pesimis dan skeptis dengan setiap program pembinaan dan pengembangan yang diprakarsai pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat (*Community Development*) telah banyak dirumuskan di dalam berbagai definisi, istilah pemberdayaan masyarakat diangkat dari istilah *people empowerment*. Salah satunya menurut Sutrisno dalam Abdurroup (2008:26) pemberdayaan masyarakat yaitu suatu bentuk upaya mendayagunakan masyarakat yang berorientasi untuk membangun masyarakat yang mandiri sehingga pembangunan masyarakat bercirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam kajian ini bukan membuat masyarakat menjadi semakin tergantung pada berbagai program pemberian oleh pemerintah daerah karena setiap apa yang dinikmati oleh masyarakat harus dihasilkan atas usahanya sendiri. Pemberdayaan masyarakat ditujukan agar masyarakat dengan potensi yang dimilikinya mampu melaksanakan kegiatan secara aktif dalam setiap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atau pengawasan oleh pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang lebih baik serta masyarakat yang berjiwa mandiri, berswadaya, mampu melakukan inovasi dan memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun usaha sendiri dan memiliki pola pikir yang kreatif.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima juga sangat dilematis di wilayah kabupaten Sumenep. Usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka penertiban dan penataan PKL ternyata dirasa belum mendapatkan hasil seperti

yang diharapkan hingga saat ini. Penataan terhadap aktivitas PKL oleh pemerintah belum mendapatkan tempat dan perhatian khusus dalam penataan ruang kawasan perkotaan. Hal tersebut menambah runyam penataan PKL yang semakin hari jumlahnya bertambah. Antisipasi yang cenderung terlambat tersebut menjadikan penataan kota yang seharusnya diatur dan disetting pemerintah menjadi tidak efektif.

Upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan PKL dengan melakukan relokasi penyediaan tempat untuk pusat kegiatan PKL, memberikan beberapa fasilitas berupa gerobak, peralatan produksi, dan lain sebagainya. Akan tetapi upaya tersebut tidak sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan oleh para pelaku PKL. Kegagalan pemerintah dalam penataan ruang kota yang terjadi selama ini, karena pemerintah tidak pernah mampu merencanakan ruang kota untuk relokasi penataan ruang kota yang baik. Bagi pemerintah, yang penting sudah diberikan lokasi baru dan retribusi jalan, sedangkan fasilitas yang lain sama sekali tidak diperhatikan sehingga tidak mengherankan kalau PKL kembali lagi ke lokasi mereka yang semula. Di satu sisi, PKL sering kali dianggap mengganggu kegiatan sektor lain seperti kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan, serta fungsi prasarana dan fasilitas publik. Namun di sisi lain, keberadaan PKL sangat membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan, sumber penerimaan daerah dan pemenuhan kebutuhan ekonomi rakyat, oleh karenanya usaha ini perlu dilindungi dan dibina.

Melihat keseluruhan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang masalah dan potensi Pedagang Kaki Lima serta Pemberdayaan

Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat. Sehingga peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat di Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam sebuah penelitian tentu adanya sebuah permasalahan yang menjadi fokus masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu “Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep?”

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian apapun yang dilakukan tentu diawali dengan rasa ingin tahu seorang peneliti. Dari rasa ingin tahu tersebut peneliti dapat menetapkan apa yang menjadi tujuan peneliti melakukan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Mahasiswa

Melatih kemampuan mahasiswa untuk dapat berinteraksi dengan Masyarakat sekaligus sebagai media pengembangan serta penerapan ilmu dan teknologi serta disiplin ilmu yang telah diperoleh dari perguruan tinggi.

2. Bagi Universitas

Perwujudan tridharma perguruan tinggi, Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan Meningkatkan citra positif perguruan tinggi sebagai salah satu pencetak generasi peubah yang positif bagi bangsa serta Secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan.

3. Bagi Masyarakat

Secara praktis diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hak-hak yang dapat diperoleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai masyarakat dan pelopor wirausaha.

4. Bagi Pemerintah

Secara praktis diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya dalam pengembangan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Areal Kota Sumenep.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan proposal skripsi.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek yang dijadikan penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab IV Gambaran Objek Penelitian

Pada bab ini berisikan gambaran tentang objek yang diteliti yang meliputi profil, visi dan misi, struktur organisasi serta sejarah singkat objek penelitian.

Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada para informan dan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut.

Bab VI Penutup

Pada bab ini berikan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran.